

## **Pengaruh Implementasi Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 Dalam Rangka Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kota Medan**

**Adibah Dalilah**

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Publik, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Jl. Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

*adibahdalilah@gmail.com*

### **Abstrak**

*Pasar merupakan sarana bagi publik untuk melakukan berbagai bentuk kegiatan ekonomi, baik dalam skala kecil maupun skala yang besar. Pasar juga menjadi objek yang penting bagi pemerintah dan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Implementasi Peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan serta toko modern di kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti melalui pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan faktafakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Peraturan wali Kota Medan Nomor 20 tahun 2011 tentang penataan jarak dan lokasi pendirian pasar tradisional dan toko modern belum sesuai dengan persyaratan yang ada didalam kebijakan tersebut. Adapun tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari Peraturan wali kota Medan Nomor 20 tahun 2011 berupa terlaksananya tindakan yang konsisten dan terencana dalam menertibkan keberadaan pasar tradisional dan toko modern di kota Medan yang saat ini tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, sarana, dan bentuk kerja sama yang dilakukan dengan instansi terkait belum terjalin secara efektif sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan secara optimal*

**Kata Kunci** : *Implementasi, penataan, pasar.*

## 1. PENDAHULUAN

Pasar merupakan sarana bagi publik untuk melakukan berbagai bentuk kegiatan ekonomi, baik dalam skala kecil maupun skala yang besar. Pasar juga menjadi objek yang penting bagi pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan fakta tersebut maka keberadaan pasar harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Salah satu media yang digunakan untuk mengelola pasar adalah kebijakan publik. Dalam penelitian ini penulis menentukan objek penelitiannya pada peraturan walikota Medan nomor 20 tahun 2011. Peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 merupakan kebijakan pemerintah kota Medan yang mengatur tentang penataan, pembinaan, dan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Dari pengamatan penulis Melalui kebijakan yang diterbitkan pada tahun 2011 ini pemerintah mengatur ketentuan lokasi dan jarak pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta toko modern di kota Medan. Dalam kebijakan tersebut diatur bahwa jarak minimum pendirian pasar tradisional dan toko modern yang sudah ada minimal 1000 M (seribu meter). Banyaknya toko-toko modern yang berada tidak jauh dari pasar tradisional, mengakibatkan rendahnya minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional dikarenakan beberapa faktor seperti kualitas, harga yang tidak jauh berbeda dengan pasar modern, tempat yang bersih, yang menjadikan masyarakat akan lebih memilih pasar modern dengan alasan kenyamanan. Berdasarkan beberapa faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus dapat memahami bahwa lokasi dan jarak antara pasar tradisional dan pasar modern sangat penting bagi pendapatan masyarakat khususnya pedagang yang ada di pasar tradisional. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh membiarkan pembangunan toko-toko modern yang jaraknya dekat dengan pasar tradisional.

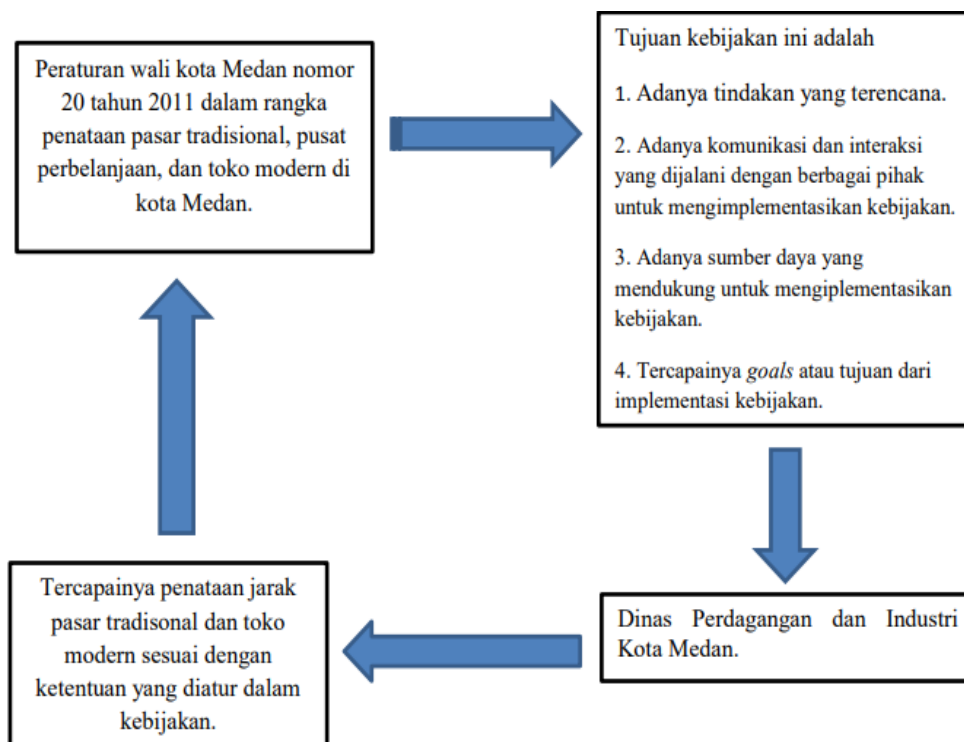
Tujuan diterbitkannya perda kota Medan nomor 20 tahun 2011 merupakan sarana pemerintah kota Medan untuk mengelola dan melindungi pasar tradisional dari tekanan pasar modern di kota Medan. Sehingga dalam hal ini peran pemerintah kota Medan sangat penting, mengingat tugas pokok dan fungsinya sebagai badan penyelenggara urusan pemerintahan khususnya di bidang pengelolaan pasar tradisional. Masalah yang timbul juga ditemukan fenomena masyarakat kMedan yang masih belum menyadari pentingnya keberadaan pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan pasar modern yang jaraknya sangat dekat dengan pasar tradisional maka masyarakat tidak sedikit yang memilih pasar modern dengan berbagai alasan termasuk soal kenyamanan melakukan transaksi jual – beli. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang maksimal dari pemerintah terhadap lokasi dan jarak antara pasar tradisional dan pasar modern di kota Medan.

Saat ini perlu disadari, bahwa pasar tradisional bukan satu-satunya pusat perdagangan,. Semakin banyaknya pusat perdagangan seperti pasar modern, baik dalam bentuk minimarket, hypermart maupun mall yang pada gilirannya dapat membuat pasar tradisional harus mampu bertahan agar tidak tergilas oleh arus modernisasi. Preferensi belanja masyarakat telah berubah dari pasar tradisional menuju ke pusat perbelanjaan atau pasar modern. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya keunggulan yang ditawarkan oleh pasar modern seperti kenyamanan, keamanan, kecepatan layanan, kualitas barang, kebersihan, kerapian, dan produk yang lengkap dan harga bersaing adalah contoh keunggulan yang dimiliki oleh pasar modern.

## 2. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang berperilaku dapat diamati. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif pada teori nya dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan selesai di lapangan. Analisis data sering kali berlangsung selama proses pengumpulan data. Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran implementasi peraturan WaliKota nomor 20 tahun 2011 tentang penataan, pembinaan, pusat perbelanjaan, serta toko modern di Kota Medan.

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilau lebih sistematis. Selain itu kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah. Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang di peroleh melalui pengumpulan data kemudian di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Data yang di

peroleh dari hasil wawancara akan di uraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

### **3. HASIL**

#### **Adanya tindakan yang terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan para narasumber maka dapat disimpulkan bahwa tindakan terencana dan konsisten yang dilakukan oleh dinas perdagangan kota Medan untuk mengimplementasikan peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 yang dengan melakukan dan meningkatkan kerja sama antara dinas perdagangan dengan DPMPTSP (dinas penanam modal, dan pelayanan terpadu satu pintu) untuk mengatur dan menata pendirian pasar-pasar modern di kota Medan agar tetap dalam batasan yang tertera di dalam peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011.

#### **Adanya Komunikasi dan interaksi yang dijalin dengan berbagai pihak untuk mengimplementasikan kebijakan.**

Berdasarkan jawaban dari para narasumber maka dapat diketahui bahwa komunikasi dan interaksi yang dilakukan untuk mengimplementasikan peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 adalah dengan melakukan komunikasi dengan pihak DPMPTSP (Dinas Penanam Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan) untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut atau rencana yang sudah dirancang agar mampu mengkomunikasikan kepada para pendiri bangunan pasar bagaimana tindakan berencana tanpa adanya gangguan, karena jika tidak ada komunikasi yang baik antara pihak Dinas Perdagangan dan DPMPTSP (Dinas Penanam Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) maka kebijakan tersebut tidak dapat terencana dengan baik.

#### **Adanya sumber daya yang mendukung untuk mengimplementasikan kebijakan.**

Berdasarkan jawaban dari para narasumber maka dapat diketahui bahwa sumber daya yang mendukung untuk mengimplementasikan kebijakan peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 adalah dengan mengupayakan bagaimana pengelolaan sumber daya yang ada atau yang sedang dalam proses pembuatan harus lebih cepat untuk diselesaikan dan dijalin dengan baik sesuai apa yang sudah diterapkan dalam peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011. Dalam hal mensosialisasikan, penataan, serta pengawasan pasar tradisional dan pasar modern narasumber juga menyatakan hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah kerja sama antara kedua pihak yaitu Dinas Perdagangan dan DPMPTSP (Dinas Penanam Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang mengelola perizinan pendirian pasar tradisional dan toko modern di Kota Medan. karena kedua pihak saling membutuhkan maka dari itu kebijakan ini akan berjalan sesuai tujuan jika memang kedua pihak dapat bekerja sama.

#### **Tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan.**

Berdasarkan jawaban dari para narasumber maka dapat diketahui bahwa tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 adalah tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan dengan melaksanakan berbagai tindakan pengawasan terhadap pemodal usaha atau stakeholders yang mempunyai kuasa atas pendirian bangunan dan mempunyai izin terhadap jarak dan

lokasi pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di kota Medan.

#### **4. PEMBAHASAN**

##### **Adanya tindakan yang terencana dan konsistensi untuk mencapai tujuan.**

Adanya tindakan yang dilakukan merupakan tanggung jawab yang dilakukan dinas perdagangan di kota Medan dalam merealisasikan pengawasan dan penataan terhadap jarak dan lokasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di kota Medan. Temuan penulis dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Bapak Rislana Indra SIP pada hari senin tanggal 30 juli 2020 pukul 10.00 WIB selaku Kepala Bidang PDN (Perdagangan dalam Negeri) yang menyatakan bahwa untuk memecahkan permasalahan yang ada didalam peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 dinas perdagangan harus mempunyai berbagai macam cara untuk mencapai tujuan dari implementasi salah satunya adalah menertibkan para pemodal atau pelaku usaha yang mendirikan pasar tradisional dan toko-toko modern di kota Medan untuk lebih memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan didalam kebijakan. Dinas perdagangan dan pihak terkait harus mengambil tindakan yang terencana dan konsisten tentang bagaimana perkembangan mengenai masalah jarak dan lokasi pendirian bangunan pasar tradisional dan toko modern di kota Medan yang tidak tertib. Dengan melakukan peningkatan sumber daya juga sangat mempengaruhi kelancaran dan persiapan dalam menyelesaikan tujuan dari peraturan tersebut. Adapun hal lain dari memecahkan permasalahan kebijakan tersebut ialah kurangnya komunikasi dan interaksi yang dijalin dari dinas perdagangan dan DPMPTSP (Dinas Penanam Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dalam hal komunikasi dinas perdagangan hanya menerima secara langsung surat izin dari pihak lain kemudian mereka langsung mengeluarkan izin untuk mendirikan bangunan pasar tradisional dan toko modern sebagaimana yang telah ditetapkan. Maka dari itu dapat disimpulkan tujuan dari terimplementasikan kebijakan ialah bagaimana terpenuhinya isi dari kebijakan peraturan wali kota nomor tahun 2011 penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kota Medan dalam mengatur lokasi dan jarak yang tertib sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pernyataan narasumber tersebut dapat diketahui bahwa dinas perdagangan kota Medan belum menyusun tindakan atau program yang terencana, konsisten dan sistematis untuk menertibkan jarak antara pasar tradisional dan toko modern sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011.

##### **Adanya komunikasi dan interaksi yang dijalin dengan berbagai pihak untuk mengimplementasikan kebijakan.**

Komunikasi dan interaksi yang dijalin oleh dinas perdagangan dan DPMPTSP (Dinas Penanam Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) merupakan salah satu cara untuk dapat menjalankan implementasi kebijakan peraturan walikota nomor 20 tahun 2011. Temuan penulis dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Bapak Rislana Indra SIP pada hari senin tanggal 30 juli 2020 pukul 10.00 WIB selaku Kepala Bidang PDN (Perdagangan dalam Negeri) yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam peraturan

wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 dinas perdagangan harus menjalin kerja sama dengan pihak DPMPTSP (Dinas Penanam Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk mengatur langkah-langkah apa saja yang harus disusun agar penataan pasar tradisional dan toko modern dikota Medan dapat tertib dan sesuai dengan persyaratan yang ada dalam kebijakan tersebut. Dinas perdagangan harus merencanakan bagaimana agar mereka dapat menjalin komunikasi dan interaksi yang baik untuk membina perkembangan pendirian lokasi dan jarak pasar tradisional serta toko modern dikota Medan . Dengan melakukan komunikasi dan interaksi maka langkah-langkah yang tepat untuk menjalin komunikasi yang baik pun akan semakin mempermudah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu dapat disimpulkan komunikasi dan interaksi dari terimplementasikan kebijakan ialah bagaimana langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan untuk menjalin kerja sama yang baik dalam membuat satu keputusan yang dapat memenuhi isi dari kebijakan peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan adan toko modern di kota Medan.

Berdasarkan pernyataan narasumber tersebut dapat diketahui bahwa dinas perdangan kota Medan belum menjalin komunikasi dan interaksi yang efektif dengan pihak terkait dalam menertibkan dan mengawasi pendirian pasar tradisional dan toko modern dikota Medan. Dinas perdagangan juga tidak menjalin hubungan dengan baik dalam menyusun rangkaian tindakan apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan tersebut

#### **Adanya sumber daya yang mendukung untuk mengimplementasikan kebijakan**

Adanya sumber daya merupakan suatu hal yang sangat membantu dalam menyelesaikan beberapa hal yang mungkin sangat sulit jika dilakukan oleh beberapa individu oleh sebab itu dalam hasil juga dapat lebih memuaskan jika sumber daya yang ada pada setiap lembaga berhasil mencapai suatu tujuan dari kebijakan atau peraturan. Maka dari hal ini sumber daya juga seharusnya dapat menjadi dukungan untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik. Sumber daya yang ada di dinas perdagangan belum memenuhi kebutuhan dalam mencapai peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011. Dalam mengembangkan industri perdagangan serta melakukan berbagai macam kelancaran dalam hal menertibkan dan mengamati jarak dan lokasi pendirian bangunan pasar tradisional dengan toko modern masih sangat minim. Oleh sebab itu sumber daya harus segera di tingkatkan agar lokasi jarak pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta toko modern di kota Medan dapat berjalan sesuai persyaratannya.

Temuan penulis dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Alwin Fahri G.Sitakar pada hari Senin tanggal 7 agustus 2020 pukul 11.00 WIB selaku Kepala Seksi Bagian Pengendalian Barang Pokok dan Penting yang menyatakan bahwa untuk tercapainya tujuan dari terimplementasikan nya peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 dinas perdagangan harus mempunyai sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam merencanakan ketentuan yang telah dirancang dengan baik salah satunya ialah membentuk satu tim khusus untuk menyusun strategi yang atau langkah-langkah yang tepat dalam melaksanakan ketertiban dan penataan pendirian pasar tradisional dan toko modern di kota Medan. Dengan terbentuk nya satu tim khusus maka pengawasan terhadap ketertiban serta pengawasan terhadap toko-toko modern di kota Medan. Maka dari itu dapat disimpulkan tujuan dari terimplementasikan kebijakan ialah bagaimana terpenuhi nya

kebutuhan sumber daya apa saja yang dapat memenuhi persyaratan yang ada didalam peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kota Medan.

Berdasarkan pernyataan narasumber tersebut dapat diketahui bahwa dinas perdagangan kota Medan belum merencanakan sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam menyusun langkah-langkah dalam mengawasi penataan lokasi dan jarak minimum pendirian pasar tradisional dan toko modern dikota Medan sesuai ketentuan yang ada pada peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011.

### **Tercapainya Tujuan Dari Implementasi Kebijakan.**

Adapun tujuan dari implementasi peraturan walikota nomor 20 tahun 2011 dalam rangka penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta tokom modern di kota medan, ialah penertiban, pengawasan, dan menyeimbangkan antara keberadaan pasar tradisional dan toko modern yang jarak dan lokasi pendirian nya tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Didalam peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 lokasi dan jarak pendirian pasar tradisional dan toko-toko modern dikota Medan pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap jalan termasuk sistem jaringan jalan lokal atau lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lingkungan didalam kota. Persyaratan penentuan jarak pendirian pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern harus mempertimbangkan lokasi dan jarak yang harus dipenuhi. Untuk membina dan menata bangunan-bangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dikota Medan.

Berdasarkan pernyataan narasumber tersebut dapat diketahui bahwa dinas perdagangan sudah mengimplementasikan peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 dengan baik, namun tindakan yang dilakukan belum memenuhi persyaratan yang ada didalam kebijakan tersebut. Pengawasan dan perencanaan yang dilakukan dinas perdagangan dan pihak terkait masih dalam tahap penyusunan strategi yang tepat dalam memecahkan permasalahan ketidaktertiban pendirian pasar tradisional dan pasar modern dikota Medan

### **Implementasi Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 Dalam Rangka Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kota Medan.**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa dinas perdagangan kota Medan penulis tidak menemukan rencana yang tepat dalam menyusun rencana untuk menyelesaikan tujuan dari kebijakan tersebut. Tetapi Dinas perdagangan sudah melakukan atau menyusun langkah – langkah yang terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan dari diimplementasikannya peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011, Selain itu juga penulis menemukan masih banyak letak bangunan pasar modern dan pasar tradisional yang belum tertib pendiriannya, serta masih tidak ada tindakan dalam hal pengawasan yang tepat untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut. Terencananya kebijakan dilakukan dinas perdagangan untuk mencapai tujuan dari peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011, ialah dinas perdagangan sudah melakukan observasi lapangan dan melihat secara langsung bagaimana ketidaktertiban pendirian bangunan pasar tradisional serta toko modern di kota medan yang belum optimal. Adapun hal yang harus direncanakan dengan baik ialah terjalin nya komunikasi dan interaksi yang dijalin dengan berbagai pihak untuk mengimplementasi kebijakan. Dinas perdagangan harus menilai bahwa komunikasi

yang akurat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengembangan penertiban pendirian bangunan pasar-pasar modern dikota Medan. Karena kebijakan implementasi akan berjalan dengan baik jika komunikasi jika memahami apa yang harus mereka kerjakakan dalam menyusun strategi yang tepat agar mendapatkan kemudahan bagi dua pihak.

Dinas perdagangan juga mempunyai peran penting dalam melaksanakan komunikasi yang baik kepada pemodal atau stakeholders agar langkah-langkah yang tersusun didalam rencana tercapai. Hal lain yang harus diutamakan selain komunikasi ialah sumber daya karena sumber daya merupakan cara dan pemanfaatan yang strategis dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah. Dengan membuat program baik secara financial maupun manusia, sumber daya sangat dibutuhkan agar tindakan yang terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan secara optimal. Maka dari itu dinas perdagangan belum melakukan tindakan yang tegas dalam memenuhi dan meningkatkan sumber daya yang mendukung untuk melaksanakan kelancaran dari terimplementasikannya peraturan tersebut. Untuk menjalankan kebijakan dan kinerja yang baik dinas perdagangan harus mampu mengatasi dan mengevaluasi program apa saja yang diinginkan dilaksanakan secara efisien. Maka dari itu penulis belum menemukan langkah-langkah strategis dalam memecahkan masalah penertiban dan pengawasan terhadap lokasi dan jarak pendirian pasar tradisional dan toko modern di kota Medan. Namun pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dari implementasi ini adalah mengurangi dan menertibkan pendirian bangunan pasar tradisional dan toko modern di kota Medan yang sudah tidak tertib seperti kurangnya pengawasan secara menyeluruh. Dinas perdagangan belum menanggapi secara tegas bagaimana kebijakan dilakukan dengan berbagai upaya atau langkah-langkah yang dapat berjalan dalam kurun waktu yang panjang.. Upaya dan tindakan yang harus dilakukan dinas perdagangan ialah meningkatkan mekanisme kinerja yang baik, upaya dalam mengembangkan kinerja yang baik harus mempunyai tindakan dan sistem yang terencana untuk mencapai tujuan.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa temuan penulis yang meliputi :

1. Tindakan yang terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan dari kebijakan peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 belum sepenuhnya terlaksana, dimana dinas perdagangan masih belum memiliki tindakan yang terencana secara baik dan tepat dalam mengambil langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan ketidaktertiban penataan lokasi dan jarak pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di kota Medan.
2. Dinas perdagangan kota Medan saat ini belum menjalin komunikasi dan interaksi yang intensif untuk mengimplementasikan kebijakan peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011, karena komunikasi dan interasksi antara dinas perdagangan dengan pihak terkait masih sangat minim untuk merancang berbagai solusi dari permasalahan lokasi dan jarak pendirian pasar tradisional dan toko modern di kota Medan.
3. Sumber daya yang mendukung untuk mengimplementasikan kebijakan dari peraturan wali kota Medan nomor 20 tahun 2011 belum terpenuhi dengan baik, karena dalam pembentukan sumber daya harus dilakukan dengan berbagai



macam tahap penyusunan strategi atau langkah-langkah yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

4. Tujuan dari implementasi kebijakan peraturan wali kota nomor 20 tahun 2011 belum tercapai sesuai dengan ketentuan yang ada didalam kebijakan tersebut, hal ini dikarenakan dinas perdagangan belum memiliki perencanaan yang tepat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

## REFERENSI

- Adhani, A., MAP, A. S. S. S., Anshori, A., Sos, S., Sinaga, C. N. A., Sos, S., ... & Ulayya, A. (2022). Relasi Media dan Kampus (Rekam Jejak FISIP UMSU dalam Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 dan Masa Pandemi Covid-19) (Vol. 1). umsu press.
- Adhani, A., Anshori, A., & Mahardika, A. (2022). Public Attitudes towards the Government's Policy Communication in Preventing COVID-19. *Jurnal ASPIKOM*, 7(1), 61-70.
- Adhani, A., MAP, A. S. S. S., Anshori, A., Sos, S., Sinaga, C. N. A., Sos, S., ... & Ulayya, A. (2022). Relasi Media dan Kampus (Rekam Jejak FISIP UMSU dalam Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 dan Masa Pandemi Covid-19) (Vol. 1). umsu press.
- Anshori, A., Sos, S., Kom, M. I., Mahardika, A., Sos, S., MAP, A. S. S. S., ... & Tanjung, Y. (2021). *Isu-Isu Global & Kontemporer Analisis dan Fakta Lapangan* (Vol. 1). umsu press.
- Agus, E., & Ali, K. (2022). Environmental Education for High School and Vocational School of Muhammadiyah City of Medan Based On Islam. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5(1), 930-937.
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614.
- ALI, K. (2018). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENCAIRAN DANA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) PERCONTOHAN YOGYAKARTA (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Ali, K., & Rizky, R. N. (2021). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENCAIRAN DANA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) MEDAN I. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2).
- Hajar, S., & Tanjung, I. S. (2020). Aplicación de un enfoque participativo en el empoderamiento de las aldeas costeras. *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*.
- Hajar, S., Tanjung, I. S., & Yenni, E. (2017, October). Empowerment of Coastal Community Through Village Potential. In *International Conference on Public Policy, Social Computing and Development 2017 (ICOPOSDev 2017)* (pp. 297-299). Atlantis Press.
- Hajar, N. K. D. S., Amrizal, D., Izharyah, J. R., & Mahardika, A. (2022). *Perencanaan Pembangunan & Pembuatan Kebijakan Daerah: Dari Teori Ke Praktik* (Vol. 1). umsu press.
- Hajar<sup>1</sup>, S., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 6(1), 136-142.
- Hartanto, D., & Siregar, S. M. (2021). Determinants of overall public trust in local government: Meditation of government response to COVID-19 in Indonesian context. *Transforming Government: People, Process and Policy*.
- Hartanto, D., Hidayat, N., & Sazali, H. (2019, January). The Leadership of Head of the Medan City Police Department in Strengthening Community Systems. In *1st Aceh Global Conference (AGC 2018)* (pp. 205-209). Atlantis Press.
- Izharyah, J. R., & Lubis, F. H. (2020). Analysis of Masterplan in Medan City Determining the Strategic Area (KSK) Social Culture Fields in Medan. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(4), 2821-2834.
- Izharyah, J. R. (2020). Analisis Strategis Pemko Medan Dalam Melakukan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Open Dumping Menjadi Sanitary Landfill. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 4(2), 109-117.

- Izharsyah, J. R. (2022, February). Community Social Phenomenon as A Preventive Action and Disaster Mitigation of Longsor Disasters in Simalungun District. In PROCEEDING INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE (Vol. 1, p. 397). umsu press.
- Martinelli, I. (2021). Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen. *Jurnal SOMASI*, 2(1), 32-43.
- Khairiah, N., Rahmi, A., & Martinelli, I. (2021). Management of Overseas Refugees in North Sumatra in the Perspective of Human Security. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 12077-12089.
- Khairiah, N., Rahmi, A., & Martinelli, I. (2021). Management of Overseas Refugees in North Sumatra in the Perspective of Human Security. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 12077-12089.
- Kusnita, N., Wibowo, Y. S., Tanjung, I. S., & Nugroho, R. (2021). Analisis Kebijakan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar dalam Mendukung Potensi Bisnis Transportasi Laut Kepulauan Riau. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(6), 724-734.
- Martinelli, I. (2017). Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 308-328.
- Martinelli, I., Khairiah, N., Nasution, N., & Khairani, L. (2021). Socialization of the quality of school graduates to increase society participation in achieving high-quality education. *Community Empowerment*, 6(12), 2303-2314.
- Martinelli, I., Khairiah, N., Nasution, N., & Khairani, L. (2021). Socialization of the quality of school graduates to increase society participation in achieving high-quality education. *Community Empowerment*, 6(12), 2303-2314.
- Mavianti, M., & Rizky, R. N. (2019, October). Upaya Pemanfaatan Bonggol Pisang Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Pada Ibu-ibu Di Dusun 2 Desa Tanjung Anom. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 138-143).
- MAHARDIKA, A. (2017). TEKNIK PEMBERIAN PAKAN (CAKE) PADA LARVA IKAN KOI (*Cyprinus carpio*) DI INSTALASI BUDIDAYA AIR TAWAR PUNTEN, KOTA BATU, JAWA TIMUR.
- Mujahiddin, M., & Mahardika, A. (2018). Analisis Potensi Konflik antara Pemerintahan Desa dan Masyarakat Pasca Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang). *Warta Dharmawangsa*, (55).
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270
- Rahmi, A., Salamah, U., & Khairiah, N. (2021). Edukasi Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Bagi Pengurus 'Aisyiyah Di Medan. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2(2), 246-256.
- Rizky, R. N., & Mavianti, M. (2019, October). Keripik Kelapa: Peluang Usaha Baru di Dusun 3 Tanjung Anom, Deli Serdang. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 311-318).
- Rizky, R. N., & Moulita, M. (2017). PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA PADA ANAK. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 206-219.
- Rizky, R. N. (2017). Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa dan Hak Anak. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal)*, 3(2), 87-96.
- Roziqin, A., Adejaya, M. S., & Ali, K. (2019, October). Strengthening local economy through tourism village: Case study in Dukuh Dalem, Sleman Regency. In *Iapa Proceedings Conference* (pp. 173-179).
- Saputra, A., & Ali, K. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PARIWISATA TERHADAP PENGELOLAAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN SAMOSIR. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 564-584.

- Syahputra, B. P., & Tanjung, I. S. (2019). Membangun Sinergi Pusat Karir dan Program Studi Melalui Program Tracer Study dan Pengembangan Karir Lulusan. *Proceeding Indonesian Carrier Center Network (ICCN) Summit*
- Syahreza, M. F., & Tanjung, I. S. (2018). Motif dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi UNIMED. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 61-84.
- Tanjung, H., Handoko, Y., Tanjung, I. S., & Yuniarsa, S. O. (2022, March). CREATIVITY AND INNOVATION IN SMALL BUSINESS: A DIGITAL SYSTEM LITERATURE REVIEW WITH ROUND MAP NEW NORMAL. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 795-802).
- Tanjung, E. F., Harfiani, R., & Sampedro Hartanto, H. (2021). Formation of Soul Leadership Model in Indonesian Middle Schools. *Educational Sciences: Theory And Practice*, 21(1), 84-97.
- Tanjung, I. S., & Putri, S. P. (2022). Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Tindakan Preventif Untuk Mewujudkan Desa Tangguh Covid-19. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 3(1), 119-123.
- Tanjung, I. S., Tanjung, H., & Wibowo, Y. S. (2021). Development of Tourism Communication Model Based on Local Wisdom in Padangsidempuan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 9877-9885.
- Yusni, M., & Asmadi, E. (2020). ENHANCING LITERATURE ON PROCEDURAL JUSTICE AND ORGANIZATIONAL LEARNING: EXAMINING MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL LEARNING AND ORGANIZATIONAL TRUST. *Journal of Security & Sustainability Issues*, 10(2).
- Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). HUKUM PERIZINAN; Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek.